



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang ☎(0295) 6980426 fax. (0295) 6980425
website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail : dinkominfo@rembangkab.go.id

Rembang Kode Pos 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555/017/ 2018

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan klasifikasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/203/2018 sebagaimana lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Rembang
pada tanggal :

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**
selaku
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**



I. WARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600110 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail : dinkominfo@rembangkab.go.id

Rembang - Kode Pos 59211

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 555/ 203/ 2018

Pada hari ini, **JUMAT** Tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** bertempat di **REMBANG**, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	001 UMUM				
1.	Dokumen kekayaan intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok /perseorangan	<ul style="list-style-type: none">➤ UU Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat ; berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat ; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan
2.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none">➤ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;➤ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan	Tidak terbatas
3.	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan publik	<ul style="list-style-type: none">➤ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;➤ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan

1	2	3	4	5	6
4.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan; ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j 	Dapat mengganggu proses penyesuaian kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
5.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan ; ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan j 	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	Setelah proses selesai
6.	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 1981, pasal 70 ayat (2) ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a, i, dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan /penyidikan, 2. dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
7.	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 6 Th 2014 tentang desa ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
8.	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Sampai selesai sengketa
9.	Dokumen proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Sampai selesai sengketa
10.	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
11.	Rencana operasi penegakan Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan
12.	Berita Acara pemeriksaan kasus berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses hukum dan 2. mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkapkan 	Tidak terbatas, namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka.

1	2	3	4	5	6
13.	<p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pimpinan DPRD ➤ Rapat Konsultasi ➤ Rapat Badan Musyawarah ➤ Rapat Badan Anggaran ➤ Rapat Badan Kehormatan 	<p>➤ Peraturan DPRD No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 71 ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73 ayat (1), (2), (3), dan (4)</p>	<p>Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (pasal 73 ayat (1)) 2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 73 ayat (2)) 3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat (2), wajib merahasiakannya 4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (13) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna</p>
	<p>200 POLITIK</p>				
14.	<p>Proses keputusan Menteri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota/pimpinan DPRD</p>	<p>➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I</p>	<p>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</p>	<p>Sampai dilantiknya anggota DPRD</p>

1	2	3	4	5	6
19.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS1.37 cm	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a, i, dan j ➢ Kep Menhukham No 1 tahun 2003 tentang Permendagri no 4 tahun 2007 tentang PPNS di lingkungan pemda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan 	Sampai ada putusan krah
20.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 23 Tahun 2014 ; ➢ UU No 14 Th 2008 ,Pasal 17 huruf a, i, dan j ➢ PP No 6 Tahun 2010 ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan/penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan 	Sampai ada putusan krah
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT					
21.	Naskah soal UN/UNPK/ UASBN, dll	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; ➢ Permendiknas ,Petunjuk operasional sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses ujian 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Sampai diujikan

1	2	3	4	5	6
15.	Proses penetapan keputusan gubernur Jawa Tengah peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu an3.81 anggota/pimpinan DPRD kabupaten kota	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I 	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dilantikannya anggota DPRD
16.	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi ,politik ,sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
17.	Data eks tapol G30S/PKI	Intruksi Mendagri No.32/1981	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM					
18.	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat (3) ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
22.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; ➤ Permendiknas ,Petunjuk operasional sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penilaian 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Sampai waktu pengu muman
23.	Dokumen rekam medis termasuk nomor tegrisasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 35 Th 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1); ➤ UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan kepen tingan pribadi dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
24.	Laporan kasus / diagnosa penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 35 Th 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 huruf h dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan kepen tingan pribadi dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijaaan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
25.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat.37 cmt dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j ➤ Permenkes No 1419/ MEN KES/ PER/ X/ 2005 Pasal 18 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi dan 2. Dapt mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
26.	Hasil diagnosa / bedah kasus calon kelayan (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	➤ UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf i	1. Dapat mengungkap ra hasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
27.	Data penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	➤ UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf i	Bertentangan dengan privasi seseorang	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Tidak terbatas
28.	Data pribadi penduduk	➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Pasal 17 huruf h dan j ➤ Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Ke pendudukan, Bab VII Bagian kedua pasal 58 dan 59	Bertentangan dengan hak pribadi /privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/ pribadi	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan public
29.	Daftar rekam medik PNS	➤ UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h dan huruf j	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS
30.	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	➤ UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h, i dan j	1. Dapat mengungkap ra hasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan
31.	Catatan Rekam Medis Pasien	➤ UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	1. Dapat mengungkap ra hasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan ada peraturan lain.

1	2	3	4	5	6
		<p>an Pasal 47 (ayat (2))</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/ Menkes/ III/ 2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 ayat (1) 	<p>2. Bisa mengganggu proses penyembuhan penderita</p>		
32.	<p>Informasi Hasil Pemeriksaan an diagnosis HIV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 h 2008 tentang KIP pasal huruf h dan i ➤ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 21 ayat 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rasia pribadi seseorang 2. Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi). 3. Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga 2. Bisa membantu penyembuhan pasien. 	<p>Sampai dengan ada peraturan lain.</p>
33.	<p>Data penderita HIV/AIDS</p>	<p>UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h dan j</p>	<p>Potensi menimbulkan kerawanan /kekhawatiran masyarakat</p>	<p>Sebagai analisa kebijakan daerah</p>	<p>Atas izin yang bersangkutan</p>
34.	<p>Dokumen kependudukan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bio data penduduk ➤ KK ➤ KTP ➤ Surat Keterangan Ke pendudukan ➤ Akta Kependudukan Sipil 	<p>UU No.23/2006 Tentang administrasi kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan / penyidikan, 2. dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 3. dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan 	<p>Selama yang bersangkutan masih hidup</p>

1	2	3	4	5	6
35.	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ➤ UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijak an terhambat 	Tidak Terbatas
36.	Data PMKS by name by address	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusua na kebijakan d 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat 	Tidak Terbatas
37.	Data PBDT (Pemukakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	➤ UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat 	Tidak Terbatas
500 PEREKONOMIAN					
38.	Data kekayaan alam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No.43 Tahun 2008 tentang kearsipan ➤ UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d & j 	Dapat mengungkapakan kekayaan alam yang berpo tensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam	Sampai diusahakan oleh pemerintah dae rah
39.	Berita sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan per tahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia

1	2	3	4	5	6
40.	Kunci sistem sandi	➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
41.	Penempatan jaringan, peralasan sandi dan tempat kegiatan sandi	➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
42.	Berita/radiogram rahasia	➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
43.	Lokasi server	➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b,i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
44.	Internet protocol/IP address private	➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
45.	Bandwidth management	➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
46.	Sistem keamanan informasi	➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan negara	Terjadi dari potensi kerugian	Selama masih digunakan/ berlaku
47.	Dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah	➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-	Sampai proses selesai/ diketahui pemenangnya

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i dan j 		prinsip pengadaan dan etika pengadaan	
48.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
49.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
50.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGA KERJAAN					
51.	Biodata individu dan data keluarga : <ul style="list-style-type: none"> • Ketenagakerjaan • Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf H 	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
700 PENGAWASAN					
52.	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan j ➤ Kepmenkes No 	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga privasi seseorang	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas izin penerima

1	2	3	4	5	6
		496/menkes/SK/IV/2005			hasil audit
53.	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h, I dan j ➤ Kepmenpan No KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang petugas pengelolaan pengawasan melekat dan pengawasan pemerintahan 	Menggangu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan
54.	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin dari pihak yang diperiksa
55.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
800 KEPEGAWAIAN					
56.	Soal-soal ujian kedinasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat (3) 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf I dan j 	Menggangu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Tidak terbatas
57.	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
58.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/ pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
59.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
60.	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf I	Menggangu kebijakn pe merintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan
61.	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan Huruf I	Menggangu kebijakan pe merintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindak lanjuti
62.	Dokumen pertimbangan/ rekomenda si Baperjakat	3. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j 4. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14	Menggangu kebijakan pe merintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
63.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	5. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14 6. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
64.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	7. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i ,dan j 8. PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektifitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin
65.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	9. UU No 11 Th 2008 tentang ITE 10. UU No 14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h, I & j	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama masih bersangkutan jadi PNS
66.	Arsip data perseorangan PNS	UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hufuf h,I, & j	Menggangu privasi seseorang	Mengamankan privasi sese orang	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang

1	2	3	4	5	6
					bersangkutan
67.	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	11. UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan j 12. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan	Setelah usulan direalisasikan
68.	Daftar pejabat yang akan dilantik	13. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j 14. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, BAB III Keputusan kepala BKN No 13 Th 2002 tentang naan PP No 100 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural, sebagai mana diubah dengan PP No 13 Th 200, Lampiran I Angka romawi II huruf B No 5	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/ pelantikan
900 KEUANGAN					
69.	Dokumen laporan/surat bertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2) ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i, dan j 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diferivikasi oleh aparatur pemeriksa / pengawas / auditor (DPKP /BPK)
70.	Data wajib pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU no 14 Th 2008 Pasl 17 huruf i dan j 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas izin yang bersangkutan